**KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKADASAR DI KOTA MALANG
(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Tahun 2022)**

Imam Fikri Haikal¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, fax: 0341-552249
Email: imamhaikal34@gmail.com

ABSTRACT

Challenges and Issues in the Education System in Indonesia, particularly in primary education, are the responsibility of the Local Government of Regencies/Cities in managing education to improve the quality of education in their respective areas. This research uses empirical juridical legal research with a socio-legal approach. The results of this research are as follows: 1) The authority of the Department of Education and Culture of Malang City is a delegated authority obtained from the transfer of existing authority by other bodies that have obtained absolute authority. The role of the Department of Education and Culture of Malang City in improving the quality of education focuses on improving management standards, with an emphasis on compulsory education and improving the status of teachers as professionals. In terms of teacher qualifications and welfare, the focus is on educational and teaching staff. Regarding infrastructure standards, the focus is on maintenance and improvement of existing facilities. 2) There are no significant obstacles to improving the quality of primary education in Malang City, but there are some factors that slightly disrupt the improvement process, such as the lack of understanding among the community regarding new regulations. 3) The solutions to improving the quality of primary education by the Department of Education and Culture of Malang City include improving management standards, teacher qualifications and welfare, and infrastructure standards.

Keywords: Authority, Role, Education Quality

ABSTRAK

Tantang dan permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola pendidikan sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini yakni: 1) Kewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang merupakan kewenangan delegasi yang didapatkan dari pengalihan kewenang yang sudah ada oleh badan lain yang telah mendapatkan kewenangan absolut. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan fokus pada peningkatan standar pengelolaan menitik beratkan pada wajib belajar dan peningkatan status guru sebagai profesi. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan fokus pada kualifikasi guru dan mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan standar sarana prasarana fokus pada perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang ada. 2) Faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang tidak ada, akan tetapi ada faktor yang sedikit mengusik jalan peningkatan mutu namun tidak signifikan yakni kurang fahamnya masyarakat mengenai regulasi-regulasi baru yang ada. 3) Solusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Malang peningkatan standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana.

Key words: *Kewenangan, Peran, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki harapan untuk menjadi bangsa yang besar, dan salah satu faktor utama yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan yang memadai sangat penting. Oleh karena itu, Indonesia wajib memberikan akses terhadap pendidikan, sesuai dengan perintah konstitusi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945². Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem otonomi daerah yang membedakannya dari negara-negara lain yang menganut sistem presidensial. Dengan adanya sistem otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, demi kepentingan lokal.³

Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik secara makro maupun mikro. Secara makro, permasalahan tersebut meliputi perubahan kurikulum, ketimpangan pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, penempatan guru yang tidak efektif, dan rendahnya kualitas guru. Di sisi lain, permasalahan pendidikan secara mikro mencakup rendahnya kualitas sarana fisik, kesejahteraan guru yang rendah, dan ketidakrelevanan pendidikan dengan kebutuhan⁴. Permasalahan tersebut tidak hanya dapat diselesaikan oleh lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah. Terdapat juga masalah koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama antara semua pihak terkait untuk mencari solusi yang efektif.⁵

Pemerintah Daerah di Indonesia menjalankan tugas ke pemerintahannya dengan menggunakan asas desentralisasi, yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah mengelola pendidikan, yang diatur dalam UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah⁶. Lampiran UU tersebut

² Wulandari Wulandari, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19," *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 2 (2022): 146–57.

³ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/1621>.

⁴ Andi Agustang, Indah Ainun Mutiara, and Andi Asrifan, "Masalah Pendidikan Di Indonesia," 2021, <https://osf.io/9xs4h/download>.

⁵ Hengki Nurhuda, "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan," *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 5, no. 2 (2022): 127–37.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

menjelaskan pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Pada tahun 2016, Wali Kota Blitar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait ketimpangan dalam UU Nomer 23 Tahun 2014 yang bertentangan dengan UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Permohonan tersebut berisi perbedaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pendidikan⁷. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomer 30/PUU-XIV/2016 menolak permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi mengikuti asas hukum bahwa peraturan yang lahir belakangan mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu. Dengan putusan MK tersebut, tanggung jawab pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada UU Nomer 32 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang jelas dalam bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Namun, seringkali Pemerintah Daerah lalai dalam menjalankan perintah konstitusi terutama dalam pendidikan dasar⁸. Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan pendidikan dasar secara cuma-ucap/gratis dan mengalokasikan 20% dari APBD untuk pendidikan. Namun, masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum memenuhi perintah konstitusi tersebut, seperti Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas dalam program Pemerintah Daerah.

Situasi pendidikan dasar di Kota Malang juga sangat memprihatinkan. Data tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa setidaknya ada 29 anak SD yang mengalami putus sekolah, dengan 24 anak pada tahun 2019 dan 5 anak pada tahun 2020⁹. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pengelolaan pendidikan dasar di Kota Malang, yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pendidikan dasar. Melihat kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut jika perintah konstitusi yang tertuang

⁷ S. H. Retno Saraswati, Ratna Herawati, and Retno Saraswati, "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEGAL," *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 293–306.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social, and Cultural (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) Pasal 13 Ayat (2) Point (a)

⁹ "Berjuluk Kota Pendidikan, Angka Putus Sekolah Di Malang Masih Tinggi - Radar Malang," accessed December 11, 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811075645/berjuluk-kota-pendidikan-angka-putus-sekolah-di-malang-masih-tinggi>.

dalam UU No. 11 Tahun 2005, terutama Pasal 13 Ayat (2) poin a, belum sepenuhnya dijalankan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, untuk memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan mutu pendidikan, perintah konstitusi mengenai pendidikan dasar yang gratis harus dijalankan terlebih dahulu. Berdasarkan hal ini, penelitian dengan judul "Kewenangan Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang)" dapat dilakukan untuk mengkaji peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang

(1) Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Indonesia sebagai negara kepulauan menerapkan sistem pemerintahan Otonomi Daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal 18, 18A, dan 18B dalam UUD 1945 mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah bersama DPR membuat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah memberikan sejumlah tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengurus urusan mereka sendiri. Namun, tidak semua urusan dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan¹⁰. Selanjutnya, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

¹⁰ Rahyunir Rauf, "Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya" (Zanafa Publishing, 2018), <https://repository.uir.ac.id/1977/1/asas%20pemda%20rahyunir.pdf>.

dari Pemerintah Pusat atau pejabat yang berada di atasnya (Provinsi) kepada kepala departemen di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab penuh, sementara daerah hanya bertindak sebagai pelaksana¹¹. Asas tugas pembantuan merujuk pada tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom atau oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Provinsi.¹²

Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat kebebasan dan kemandirian, baik asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan memiliki unsur otonomi. Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dan kemandirian tertentu, sedangkan dalam tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian terbatas pada cara pelaksanaannya. Meskipun ada perbedaan, keduanya tetap memiliki unsur otonomi dan tidak terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara keduanya.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintah daerah dikenal dengan istilah Pemerintahan Konkuren. Pemerintah Daerah sebagai pemerintahan konkuren memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam bidang pendidikan, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui undang-undang ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Selain itu, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan sesuai dengan pembagian urusan yang telah ditetapkan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang dibagi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam struktur pemerintahan. Pendidikan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan amanah konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai urusan konkuren, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pendidikan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, kepentingan nasional, dan prinsip-

¹¹ "NANGGULAN - " AZAS PEMERINTAHAN DAERAH" Sebuah Artikel Yang Di Tulis Jawatan Praja Kapanewon Nanggulan," accessed December 27, 2023, <https://nanggulan.kulonprogo.kab.go.id/detil/842/azas-pemerintahan-daerah-sebuah-artikel-yang-di-tulis-jawatan-praja-kapanewon-nanggulan>.

¹² Tim Hukumonline, "3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya," hukumonline.com, accessed December 27, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/>.

prinsip lainnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sektor pendidikan di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam pembagian urusan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah¹³.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peraturan tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab dalam Pasal 28 hingga Pasal 38. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendidikan melalui wewenang delegasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sebagai pemerintahan daerah, mereka menjalankan tugas pembantuan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk dalam bidang pendidikan. Di Kota Malang, tanggung jawab pendidikan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai departemen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pendidikan di daerah tersebut¹⁴.

(2) Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

a. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan mencakup semua aspek yang terkait dengan manajemen proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan merupakan elemen penting dan tak terpisahkan dalam keseluruhan proses pendidikan. Tanpa manajemen yang baik, tujuan pendidikan tidak dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien¹⁵. Pemerintah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016. Tugas pemerintah

¹³ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *JHJK* 5, no. 2 (2020): 14–24.

¹⁴ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

¹⁵ Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasinya*. (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 20

daerah dalam mengelola pendidikan dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Standar pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan yang paling rumit dari standar yang lain, sebab dalam standar ini mencakup pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Terdapat tujuh aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mengelola pendidikan tingkat dasar, keenam aspek tersebut yakni¹⁶:

- a. Wajib Belajar
- b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah
- c. Penuntasan pemberantasan buta aksara
- d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat
- e. Peningkatan status guru sebagai profesi
- f. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat
- g. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan

b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, karena mereka berperan dalam membentuk generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan standar yang mengatur mengenai kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan agar mereka memiliki kualitas yang baik dalam mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi penerus bangsa yang mampu bersaing di tingkat internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 41 Ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pendidik agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Seorang pendidik yang berkualitas dapat diidentifikasi melalui keterampilan mengajar, pengetahuan, sifat, perilaku, pemahaman, penghargaan, dan harapan terhadap individu yang telah berhasil

16 Mugi Rahayu, "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngeplak, Sleman," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2015), <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/viewFile/4929/4256>.

menjalankan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kualifikasi pendidik agar mereka dapat menjadi pendidik yang ahli, seperti memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dalam agen pembelajaran, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Pendidik juga harus memiliki pendidikan formal yang sesuai dengan bidang yang akan diajarkan, serta kompetensi dalam metode mengajar, pemahaman materi pelajaran, dan kemampuan berkomunikasi dengan siswa.

Selain itu, seorang pendidik juga harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani yang baik akan membantu pendidik dalam menjalankan tugasnya secara optimal, sedangkan kesehatan rohani akan mempengaruhi kualitas interaksi dan hubungan dengan siswa, serta kemampuan dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka¹⁷. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dengan adanya standar yang jelas mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan generasi yang berkualitas.

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi landasan esensial dalam mengukur dan memastikan bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pendidik yang ada di Kota Malang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Berkaitan dengan kesejahteraan pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang telah menyejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program-program pengembangan diri sebagai upaya dalam meningkatkan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan¹⁸.

c. Standar Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan, baik sebagai peralatan langsung dalam proses belajar mengajar maupun sebagai fasilitas penunjang. Sarana pendidikan meliputi peralatan dan perlengkapan yang digunakan

¹⁷ Jaja Jahidi, "Kualifikasi Dan Kompetensi Guru," *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana* 2, no. 1 (2017): 23–30.

¹⁸ Muhlasin Amrullah, Nur Lailatul Khasanah, and Khizanatul Hikmah, "Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo," *Jurnal Pendidikan Edutama* 10, no. 2 (2023): 41–52.

secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, dan media pengajaran. Sementara itu, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman, sekolah, dan jalan menuju sekolah. Namun, jika fasilitas tersebut digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi atau halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, maka fasilitas tersebut juga dianggap sebagai sarana pendidikan¹⁹.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur mengenai sarana prasarana pendidikan. Pasal 45 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sarana pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, sedangkan prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan²⁰.

Pemerintah Kota Malang juga memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan formal dan nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penyelenggara pendidikan meliputi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Dinas Pendidikan di tingkat daerah, lembaga pendidikan formal dan nonformal, dan organisasi masyarakat. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pemerintah Kota Malang akan

¹⁹ Anis Zohriah, "Analisis Standar Sarana Dan Prasarana," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2015): 53–62.

²⁰ Baiq Rohiyatun, "Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* 7, no. 1 (2019), <http://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/view/1974>.

memberikan suntikan dana untuk perbaikan fasilitas pendidikan di sekolah dasar yang ada di Kota Malang. Selain itu, pada tahun 2024, Pemerintah Kota Malang juga akan melakukan perbaikan kepada 40 sekolah yang dianggap perlu. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Sarana prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung mutu pendidikan. Standar sarana prasarana menjadi acuan dalam menentukan kualitas dan kecukupan fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Pentingnya standar sarana dan prasarana terletak pada kemampuannya untuk memberikan fasilitas yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik. Pemberian bantuan dalam merawat dan memperbaiki sarana prasarana satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Malang telah memberikan bantuan dana yang cukup untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap sarana maupun prasarana di satuan pendidikan dasar yang ada di Kota Malang.

B. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Malang

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menghadapi sedikit hambatan dalam mengelola pendidikan di daerah tersebut. Namun, berdasarkan pernyataan Bapak Dodi, Kepala Bagian Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, tidak ada hambatan yang signifikan dalam pengelolaan pendidikan di Kota Malang. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting yang tidak menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan apa pun yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang selalu mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemerintah. Kedua, masyarakat Kota Malang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Hambatan yang mungkin ada terkait dengan pemahaman masyarakat tentang regulasi, seperti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang telah memberikan

pemahaman yang baik kepada masyarakat sehingga hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dengan dukungan dana yang memadai dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dapat mengelola pendidikan dengan baik dan mencapai peningkatan mutu pendidikan dasar yang diinginkan. Hambatan yang ada terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap regulasi dapat diatasi melalui upaya pemahaman yang dilakukan oleh dinas tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan pendidikan di daerah tersebut.

C. Solusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang

Dalam Upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang perlu memperhatikan standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana prasarana pendidikan. Berikut solusi yang ditawarkan oleh kami terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang.

a. Standar Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan mengimplementasikan standar pengelolaan pendidikan yang baik. Hal ini meliputi:

- 1) pengembangan sistem manajemen pendidikan yang efektif, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 2) Dinas Pendidikan dapat membentuk tim pengelola yang kompeten dan terampil, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
- 3) penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pengelolaan pendidikan terpenuhi.

b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu solusi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang adalah dengan memperhatikan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan

- 1) Meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur. Program pelatihan dapat meliputi peningkatan kompetensi pedagogis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan soft skills.
- 2) Mendorong partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan diri dan kolaborasi antar guru, sehingga mereka dapat terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka

c. Standar Sarana Prasarana

Dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang, Dinas Pendidikan perlu memperhatikan standar sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini meliputi:

- 1) Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan area olahraga.
- 2) Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi yang baik dan aman bagi proses pembelajaran.

KESIMPULAN

1. Kewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang merupakan kewenangan delegasi yang didapatkan dari pengalihan kewenang yang sudah ada oleh badan lain yang telah mendapatkan kewenangan absolut. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan fokus pada peningkatan standar pengelolaan menitik beratkan pada wajib belajar dan peningkatan status guru sebagai profesi. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan fokus pada kualifikasi guru dan mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan standar sarana prasarana fokus pada perawatan dan perbaikan sarana prasaran yang ada.
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Malang tidak ada, akan tetapi ada faktor yang sedikit mengusik jalan peningkatan mutu namun tidak signifikan yakni kurang fahamnya masyarakat mengenai regulasi-regulasi baru yang ada.
3. Solusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Malang peningkatan standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016

Buku

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan

Mulyasa. 2008. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasinya*. Bandung: Rosda Karya

Jurnal

Agustang, Andi, Indah Ainun Mutiara, and Andi Asrifan. "Masalah Pendidikan Di Indonesia," 2021. <https://osf.io/9xs4h/download>.

Amrullah, Muhlasin, Nur Lailatul Khasanah, and Khizanatul Hikmah. "Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo." *Jurnal Pendidikan Edutama* 10, no. 2 (2023): 41–52.

Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *JIHK* 5, no. 2 (2020): 14–24.

Jahidi, Jaja. "Kualifikasi Dan Kompetensi Guru." *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana* 2, no. 1 (2017): 23–30.

Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/1621>.

"NANGGULAN - " AZAS PEMERINTAHAN DAERAH" Sebuah Artikel Yang Di Tulis Jawatan Praja Kapanewon Nanggulan,." Accessed December 27, 2023. <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/842/azas-pemerintahan-daerah-sebuah-artikel-yang-di-tulis-jawatan-praja-kapanewon-nanggulan>.

Nurhuda, Hengki. "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan." *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 5, no. 2 (2022): 127–37.

Rahayu, Mugi. "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak, Sleman." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2015). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/viewFile/4929/4256>.

Rauf, Rahyunir. "Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya." Zanafa Publishing, 2018. <https://repository.uir.ac.id/1977/1/asas%20pemda%20rahyunir.pdf>.

Retno Saraswati, S. H., Ratna Herawati, and Retno Saraswati. "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEGAL." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 293–306.

Rohiyatun, Baiq. "Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* 7, no. 1 (2019). <http://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/view/1974>.

Wulandari, Wulandari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19." *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 2 (2022): 146–57.

Zohriah, Anis. "Analisis Standar Sarana Dan Prasarana." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2015): 53–62.

Internet

"Berjuluk Kota Pendidikan, Angka Putus Sekolah Di Malang Masih Tinggi - Radar Malang." Accessed December 11, 2023.

DINAMIKA

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829

Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, halaman 9764 - 9778

<https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811075645/berjuluk-kota-pendidikan-angka-putus-sekolah-di-malang-masih-tinggi>.

Hukumonline, Tim. “3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya.” hukumonline.com. Accessed December 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/>.